

**PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN *SMART VILLAGE*  
(STUDI DI PEKON SUKANEGERI JAYA KECAMATAN TALANG  
PADANG KABUPATEN TANGGAMUS)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SANTI OKTAVIA  
NPM 1716041020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN *SMART VILLAGE* (STUDI DI PEKON SUKANEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS)**

**Oleh**

**SANTI OKTAVIA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan *smart governance* dalam konteks *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *smart governance* tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan *website* resmi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator *smart governance* menurut Cohen yang mencakup *Enabling supply & demand side policy, Transparency & open data*, serta ICT & E-Gov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* di pekon Sukanegeri Jaya sudah baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu partisipasi aktif dari masyarakat. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penerapan *smart governance* di pekon Sukanegeri Jaya yaitu faktor pendanaan, modal sosial, jejaring dan kolaborasi, dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Penerapan, *smart governance*, *smart village*.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SMART GOVERNANCE IN REALIZING SMART VILLAGE**

**(STUDY IN PEKON SUKANEGERI JAYA, TALANG PADANG DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY)**

**By**

**SANTI OKTAVIA**

*This research aims to find out how smart governance is implemented in the context of smart villages in Pekon Sukanegeri Jaya and the factors that influence the implementation of smart governance. The research method is carried out with a descriptive qualitative approach based on the concept of smart governance according to Cohen which includes 3 dimensions, namely Enabling supply & demand side policy, Transparency & open data, and ICT & E-Gov. The research results showed that the implementation of smart governance in Pekon Sukanegeri Jaya was carried out well. However, there are still several things that need to be improved, namely active participation from the community. There are 4 factors that influence the implementation of smart governance in Pekon Sukanegeri Jaya, namely funding, social capital, networking and collaboration, and community participation.*

**Keywords: Implementation, smart governance, smart village.**

**PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN *SMART VILLAGE*  
(STUDI DI PEKON SUKANEGERI JAYA KECAMATAN TALANG  
PADANG KABUPATEN TANGGAMUS)**

Oleh

**SANTI OKTAVIA  
NPM 1716041020**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN *SMART VILLAGE* (STUDI DI PEKON SUKANEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS)**

Nama Mahasiswa : **Santi Oktavia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1716041020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 1981062820050110003

  
**Ita Purnantika, S.Sos., M.A.**  
NIP. 19840630 201504 2 002

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Melhyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 197405202001122002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Simon Sumanjoyo H, S.A.N.,M.P.A.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos.,M.A.**



Penguji Utama: **Rahayu Sulistiowati, S.Sos.,M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
**NIP. 19610807 198703 2001**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Juni 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Santi Oktavia  
NPM 1716041020

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Santi Oktavia, lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara kandung dari pasangan Bapak Satori dan Ibu Mispon. Penulis bertempat tinggal di Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Lampung Barat.

Penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Karang Rejo Kabupaten Tanggamus (2005-2011), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Bina Utama Kabupaten Tanggamus (2011-2014), Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus (2014-2017). Pada Bulan Agustus Tahun 2017, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan sebagai mahasiswa penerima beasiswa BIDIKMISI.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam berorganisasi baik organisasi tingkat Universitas maupun Fakultas yaitu FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam) dan HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) pada tahun (2017-2018). Pada Bulan Februari 2020 penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 - Januari 2021 penulis melaksanakan magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung.

## MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“...dan aku tidak pernah kecewa dalam berdo’a kepadaMu”.  
(Q.S Maryam: 4)

“From the river to the sea, Palestine will be free”.  
(Unknown)

“You don’t need to be muslim to stand up for Palestine, you just need to be human”.  
(Unknown)

“Cara mengikat nikmat adalah dengan bersyukur”.  
(Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya tulis ini, untuk orang-orang yang aku sayangi dan kucintai :

## **Ayah dan Ibu tercinta,**

Yang selama ini selalu mendoakan, segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa-doa yang kalian panjatkan di setiap sujud. Terimakasih untuk semua pengorbanan, bimbingan, dan juga kasih sayang yang tak terhingga yang selama ini kalian berikan. Saya selalu bersyukur kepada tuhan karena dilahirkan dari orang tua yang hebat seperti ayah dan ibu.

## **Kakak dan adikku tersayang,**

Yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untukku,

## **Sahabat-sahabatku,**

Yang selalu ada untukku, memberikan semangat, bantuan, dukungan, motivasi dan menemani aku dalam keadaan susah maupun senang,

## **Para Dosen dan Civitas Akademika,**

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan juga dukungan serta doa

## **Almamater Tercinta,**

Universitas Lampung

## SANWACANA

**Alhamdulillahirabbil'alamin**, puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-nya serta berkat doa dan restu dari restu kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan *Smart Governance* Dalam Mewujudkan *Smart Village* (Studi Di pekon Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Pendidikan Tinggi yang telah mendanai pendidikan penulis selama 4 tahun melalui beasiswa BIDIKMISI.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus. Terimakasih telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ita Prihantika S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan selalu memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas masukan-masukan, saran dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P. yang telah membantu, membimbing, dan menyediakan tempat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Kepada Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNILA terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal untuk kehidupan penulis kedepannya.
9. Mba Wulan dan Mbak Uki selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediannya selama ini.
10. Segenap Informan Penelitian Kantor Pekon Sukanegeri Jaya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Andriyansyah Puad dan Kak Agung dan beberapa informan lainnya atas waktu luangnya dan informasi serta data-data yang telah diberikan kepada penulis.
11. Terimakasih untuk keluargaku yang sangat aku sayangi, kedua orang tuaku yang sangat hebat Ibu Mispon dan Bapak Satori (Paing), Kakakku Elmi Setiawati dan Adikku Shela Nur Safitri. Terima kasih atas pengorbanan, perjuangan, doa-doa serta kasih sayang yang tiada batas. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini diberikan untuk menyelesaikan studi sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara.
12. Teman teman Angkasa (ANE 2017) terimakasih atas persahabatan, doa, dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses. Aamiin.
13. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, Okta Prastika, Aisyah Gustiyah Rahmawati, Adinda Dwigista, Yola Maldini, Dianya Bintang, Maryuki Kusuma, Rika Selvina, Mohamad Firmansyah,

Ridho Bayu Ortega, dan Oktivia Asyari. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan kebersamaannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua sukses. Aamiin.

14. Sahabatku Okta Prastika dan Puspita Anggraini. Terimakasih telah bersedia direpotkan. Terimakasih atas segala doa, semangat dukungan, motivasi dan semua bantuan yang diberikan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kita sukses kedepannya.
15. To my friend, Md. Sourav Sarkar and Nohely Chacon Perez. Thanks a lot for your love and support.
16. Keluarga KKN Desa Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Terimakasih untuk pengalaman dan persaudaraan selama 40 hari.
17. Teman berbagi suka dan duka di perkuliahan Ni Made Nurai Erawanti dan Heni Puspita Sari terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
18. Teman-teman MPQ Unila (Mahasiswa Penghafal Qur'an), FGQ (Forum generasi Qur'ani) dan Ustadzah Aulia Musla Mustika. Terimakasih atas kebersamaannya yang luar biasa dan ilmu yang mengantarkan saya sampai ke titik ini.
19. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga pembelajaran.
20. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

Penulis,

**Santi Oktavia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Praktis .....	9
1.4.2. Manfaat Akademik .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. <i>E-Government</i> .....	12
2.3. <i>Smart village</i> .....	14
2.4. <i>Smart Governance</i> .....	18
2.5. Kerangka Pikir.....	21
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	23
3.2. Fokus Penelitian .....	24
3.3. Lokasi Penelitian .....	26
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6. Teknik Analisis Data .....	30
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	32
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Profil Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1. Sejarah .....	34
4.1.2. Kondisi Umum.....	35
4.1.3. Kondisi Lingkungan Strategis .....	35
4.1.4. Kondisi Demografis.....	36

4.1.5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya .....	38
4.1.6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	40
4.1.7. Program, Kebijakan dan Strategi .....	42
4.1.8. Struktur Organisasi Pekon Sukanegeri Jaya .....	44
4.2. Hasil Penelitian.....	45
4.2.1. Penerapan <i>Smart Governance</i> .....	45
4.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Smart Governance</i> .....	82
4.3. Pembahasan .....	93
4.3.1. Penerapan <i>Smart Governance</i> .....	93
4.3.2. Faktor yang Mempengaruhi.....	111
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
5.1. Kesimpulan.....	116
5.2. Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****TABEL TRIANGULASI**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa menurut IDM .....	3
Tabel 2. Data IDM Provinsi Lampung 2019-2023 .....	3
Tabel 3. Perkembangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan di Indonesia. ....	4
Tabel 4. Desa <i>pilot project</i> program <i>Smart village</i> di provinsi Lampung .....	6
Tabel 5. Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 6. Perbedaan antara <i>smart city</i> dan <i>smart village</i> .....	16
Tabel 7. Dimensi <i>smart village</i> .....	17
Tabel 8. Indikator <i>Smart Governance</i> .....	20
Tabel 9 Daftar Informan.....	28
Tabel 10. Kepala Pekon Sukanegeri Jaya .....	34
Tabel 11. Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah.....	36
Tabel 12. Jumlah penduduk Pekon Sukanegeri Jaya berdasarkan rentang umur .	37
Tabel 13. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Sukanegeri Jaya .....	38
Tabel 14. Jenis Pekerjaan Penduduk Pekon Sukanegeri Jaya.....	39
Tabel 15. Status IDM Pekon Sukanegeri Jaya. ....	48
Tabel 16. Perbedaan <i>website</i> desa sebelum dan sesudah <i>smart village</i> .....	56
Tabel 17. Pembangunan fisik Pekon Sukanegeri Jaya.....	78
Tabel 18. Daftar pelayanan publik berbasis TIK .....	106

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	22
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pekon Sukanegeri Jaya .....	44
Gambar 3. Penetapan lokasi sasaran <i>pilot project smart village</i> provinsi Lampung tahun 2020.....	49
Gambar 4. Mesin pindai KTP, laptop, dan komputer .....	53
Gambar 6. Tampilan <i>website</i> Sukengeri Jaya.id .....	55
Gambar 7. <i>Website</i> lama Pekon Sukanegeri Jaya .....	55
Gambar 8. Log-in layanan mandiri dengan NIK .....	59
Gambar 9. Tampilan layanan <i>permohonan</i> surat .....	59
Gambar 10. Log-in layanan mandiri dengan E-KTP .....	60
Gambar 11. Poster pengumuman pelatihan komputer .....	61
Gambar 12. Kegiatan belajar sambil menonton dongeng .....	61
Gambar 13. Bantuan <i>smart tv</i> dari Perpustakaan .....	62
Gambar 14. Bantuan pengadaan buku dari <i>perpustakaan</i> Provinsi Lampung .....	62
Gambar 15. Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan .....	63
Gambar 16. Keripik SOEKA CHIPS .....	64
Gambar 17. Hasil Produksi Pandai Besi "Bagus Jaya" .....	65
Gambar 18. Sanggar Putri Ayu .....	65
Gambar 19. Hasil Kerajinan adat lampung .....	66
Gambar 20. Promosi produk UMKM dan budaya melalui Facebook .....	67
Gambar 21. Tampilan lapak desa.....	68
Gambar 22. Fitur peta lokasi penjual pada lapak desa.....	68
Gambar 23. Tampilan Layanan Aduan .....	71
Gambar 24. Tampilan pembuatan aduan baru .....	72
Gambar 25. Arsip berita pekon .....	73
Gambar 26. Daftar Penerima Bantuan Keluarga.....	74
Gambar 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Sukanegeri Jaya.....	75
Gambar 28. Musrenbang Pekon 2023 .....	77
Gambar 29. Musyawarah desa .....	77
Gambar 30. Penyerahan penghargaan lomba BBGRM 2019 .....	79
Gambar 31. Kegiatan pelatihan ibu-ibu PKK dalam pembuatan keripik talas dan prakarya dari stik es krim.....	80
Gambar 32. Kegiatan pemberdayaan pemudipekon Sukanegeri Jaya .....	81

Gambar 33. Tampilan Facebook Muli Mekhanai Sukanegeri Jaya dan Andan Ya TV .....	82
Gambar 34. Pelatihan dan bimtek dalam meningkatkan modal sosial Pekon Sukanegeri Jaya.....	86
Gambar 35. Kerjasama dengan akademisi (mahasiswa KKN) .....	90
Gambar 36. Pelayanan administrasi Pekon Sukanegeri Jaya.....	91

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dalam tata pemerintahan. Desa menjadi komponen yang sangat penting dalam menggerakkan masyarakat Indonesia. Berbagai permasalahan yang terjadi di desa hendaknya menjadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah pembangunan desa. Jika pembangunan nasional yang dilaksanakan cenderung bias kota, maka permasalahan sosial, politik, dan ekonomi seperti meningkatnya arus urbanisasi dan kemiskinan akan terus terjadi (Santoso dkk., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi desa-desa di Indonesia untuk semakin mandiri dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari: *pertama*, adanya pemberian kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi desa) sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal. *Kedua*, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*).

Pembangunan desa ini juga direalisasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Desa

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan sedikitnya lima sasaran yang menjadi target untuk direalisasikan. Kelima sasaran tersebut adalah:

1. Terwujudnya desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10.000 desa.
2. Terwujudnya desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5.000 desa.
3. Terwujudnya revitalisasi kawasan perdesaan sebanyak 60 kawasan perdesaan.
4. Terwujudnya revitalisasi kawasan transmigrasi sebanyak 63 kawasan transmigrasi.
5. Terentaskannya daerah tertinggal sebanyak 25 kabupaten tertinggal.

Ketercapaian target sasaran pembangunan desa tersebut dapat dilihat dari data Indeks Membangun Desa (IDM). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tentang Indeks Desa Membangun, IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Ketiga indeks tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa yang dikelompokkan kedalam lima status desa yaitu:

- a. Desa mandiri/desa sembada
- b. Desa maju/desa pra-semabada
- c. Desa berkembang/desa madya
- d. Desa tertinggal/desa pra-madya
- e. Desa sangat tertinggal/desa pratama.

Secara administratif desa di Indonesia hingga tahun 2023 adalah sebanyak 74.421 yang dikategorikan menjadi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Berdasarkan IDM, perkembangan menurut status kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa menurut IDM

No.	Kategori	2021	2022	2023
1.	Mandiri	3269	6238	11456
2.	Maju	15321	20249	23029
3.	Berkembang	38083	33902	28751
4.	Tertinggal	12635	9584	6803
5.	Sangat tertinggal	5649	4982	4382

Sumber: [https://kemendes.go.id/idm\\_data](https://kemendes.go.id/idm_data) (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan data IDM pada tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 jumlah desa dengan kategori sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang mengalami penurunan. Adapun jumlah desa maju dan desa mandiri mengalami kenaikan. Hal ini menandakan berkurangnya jumlah desa tertinggal serta meningkatnya jumlah desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.

Status IDM rata-rata provinsi Lampung juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data IDM Provinsi Lampung 2019-2023

No.	Tahun	Skor IDM	Status IDM
1.	2019	0,5645	Berkembang
2.	2020	0,6656	Berkembang
3.	2021	0,6805	Berkembang
4.	2022	0,7018	Berkembang
5.	2023	0,7184	Maju

Sumber: [Kemendes.go.id](https://kemendes.go.id) (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa IDM Provinsi Lampung pada tahun 2020 masih dikategorikan berkembang dengan skor nilai IDM 0,6656. Kemudian pada tahun 2021 status IDM Provinsi Lampung masih berkembang dengan skor nilai IDM 0,6805. Selanjutnya pada tahun 2022,

status IDM Provinsi Lampung masih berkembang dengan peningkatan skor menjadi 0,7018. Kemudian pada tahun 2023 status IDM Provinsi Lampung menjadi kategori maju dengan skor nilai 0,7184. Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan skor IDM setiap tahun, hingga pada tahun 2023 status IDM provinsi Lampung mengalami peningkatan dari kategori berkembang menjadi kategori maju. Peningkatan Indeks Data Membangun ini menandakan adanya keberhasilan pembangunan desa-desa di provinsi Lampung.

Sekalipun pembangunan desa mengalami peningkatan namun pembangunan di perdesaan dan perkotaan masih mengalami kesenjangan (Ella dan Andari, 2021). Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan di Indonesia.

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)	
		Perkotaan	Perdesaan
1.	2020	7,88	13,20
2.	2021	7,38	12,82
3.	2022	7,50	12,29
4.	2023	7,29	12,22

*Sumber: (BPS 2020), (BPS 2021), (BPS 2022), (BPS 2023).*

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa meskipun persentase jumlah penduduk miskin baik di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai 2023, namun jika dibandingkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan.

Berdasarkan kondisi pembangunan di Indonesia melalui data tersebut maka diperlukan langkah solutif untuk menekan angka kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan status desa di Indonesia. Salah satu langkah alternatif dalam rangka mengakselerasi pembangunan desa tersebut adalah melalui program *Smart village* atau desa cerdas. *Smart village*

merupakan pendekatan pembangunan desa yang solutif dan inovatif yang dinilai mampu mendorong akselerasi transformasi ekonomi desa dan kemandirian desa di Indonesia yang sejalan dengan kebijakan strategis pembangunan nasional (Ella dan Andari, 2021). Konsep *smart village* ini mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara ringkas *smart village* adalah desa cerdas berbasis digital.

*Smart village* di provinsi Lampung dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 tentang Kewenangan Desa yang didalamnya terdapat klausul tentang menciptakan desa-desa yang mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan anggaran dana desa dari pemerintah. Selain itu pelaksanaan program *smart village* Provinsi Lampung juga didasarkan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Program *smart village* atau desa cerdas di provinsi Lampung merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja gubernur dan wakil gubernur Lampung. Hingga tahun 2021 sudah terdapat 130 desa lokus *smart village* di provinsi Lampung yang tersebar di 13 kabupaten.

Pekon Sukanegeri Jaya merupakan desa yang terpilih sebagai lokus *pilot project smart village* di kabupaten Tanggamus mewakili kecamatan Talang Padang berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/228/II.02/HK/2020 tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot project Smart village* di Provinsi Lampung bersamaan dengan pekon Purwodadi yang mewakili kecamatan Gisting. Pada tahun 2021 lokus penerapan *smart village* di Tanggamus bertambah 5 pekon yaitu Margoyoso, Dadapan, Sidokaton, Landbaw dan Negeri Ratu.

Tabel 4. Desa *pilot project* program *Smart village* di provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jumlah	Desa
1.	Lampung Barat	7	Tanjung Raya, Hanakau, Pagar Dewa, Rigis Jaya, Watas, Trimulyo, Pampangan.
2.	Pesisir Barat	4	Rawas, Sukajadi, Kampung Jawa, Suka Marga.
3.	Tulang Bawang Barat	4	Marga Kencana, Daya Asri, Pulung Kencana, Murni Jaya.
4.	Tanggamus	7	Sukanegeri Jaya, Margoyoso, Dadapan, Sidokaton, Landbaw, Negeri Ratu, Purwodadi.
5.	Pringsewu	11	Podomoro, Gading Rejo Timur, Bandung Baru, Sukoharjo 3 Barat, Keputran, Waringin Sari Barat, Mataram, Sukamulya, Sri Rahayu, Ambarawa Barat, Margosari. Bertambah secara mandiri 126 desa, 4 kelurahan, 9 kecamatan terintegrasi, Pringsewu <i>Smart City</i> .
6.	Pesawaran	11	Hanura, WatesWay Ratai, Banjaran, Way Layap, Sukadadi, Bernung, Kebagusan, Bunut, Begelan, Gunung Rejo, Padang Cermin, Sukaraja.
7.	Lampung Selatan	18	Bumi Sari, Tarahan, Kecapi Way Kalam, Sumur Kumbang, Rejosari, Tajung Sari, Sukadamai, Hajimena, Sukamarga, Rangai Tri Tunggal, Rawa Selapan, Cinta Mulya, Kedaung, Pasuruan, Kalisari, Bumi Jaya, Cugung.
8.	Lampung Utara	4	Semuli Jaya, Madukono, Sumber Arum, Way Lunik.
9.	Tulang Bawang	15	Penawar Jaya, Bujuk Agung, Cempaka Jaya, Wiratama, Kahuripan Jaya, Ujung Gunung Ilir, Mulyo Dadi, Sumber Agung, Karya Makmur, Panca Tunggal Jaya, Kecubung Raya, Kecubung Jaya, Tridarma Wirajaya, Dwi Warga Tunggal Jaya, Karya Bakti.
10.	Lampung Tengah	31	Adijaya, Karan Endah, Terbanggi Subing, Jatidatar Mataram, Kota Gajah, Sangga Buana, Swastika Buana, Joharan, Mekar Jaya, Meranggi Jaya, Rantau Jaya Ilir, Dharma Agung Mataram, Wirata Agung Mataram, Mataram Jaya, Surabaya Ilir, Cempaka Putih, Restu Buana, Gaya Baru Satu, Dono Arum, Sri Kencono, Uman Agung, Reno Basuki, Totokaton, Rukti Basuki, Candi Rejo, Tanggul Angin, Wates, Sidomulyo.
11.	Mesuji	5	Adai Luhur, Eka Mulya, Tanjung Meneng, Tanjung Mas Makmur, Sidang Kurnia Agung.
12.	Way Kanan	4	Tanjung Rejo, Setia Negara, Mekar Asri, Negara Batin.
13.	Lampung Timur	7	Nibung, Hargo Mulyo, Taman Negeri, Shribawono, Tegal Yoso, Tulus Rejo, Labuhan Maringgai.

*Sumber: Official Smart village, (2021) Diolah Oleh Peneliti (2022)*

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan terpilihnya Pekon Sukanegeri Jaya menjadi *pilot project* pelaksanaan desa cerdas dikarenakan adanya kebutuhan dari pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya itu sendiri untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat pekon Sukanegeri Jaya. Jauh sebelum melaksanakan program desa cerdas sejak tahun 2015 Pekon Sukanegeri Jaya telah mengembangkan

*website* desa namun pengelolaannya belum maksimal. Selain itu sejak tahun 2016 Pekon Sukanegeri Jaya juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan anggaran keuangan pekon. Menindaklanjuti upaya pembangunan pekon dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2018 Pekon Sukanegeri Jaya menyediakan internet gratis yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur pekon maupun masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diuraikan permasalahan yang ada di pekon Sukanegeri Jaya yaitu adanya peluang menuju digitalisasi pemerintahan dengan ketersediaan internet pekon namun pengembangan sistem atau aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal. Berdasarkan pertimbangan ini Pekon Sukanegeri Jaya antusias untuk menjadi *pilot project* pelaksanaan program *smart village* tahun 2020 mewakili kecamatan Talang Padang.

*Smart village* merupakan pengembangan dari program *smart city*. Santoso (2019) menyatakan bahwa terdapat 6 indikator dalam *smart village* yaitu *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, *smart living*, dan *smart governance*. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Operator Pekon Sukanegeri Jaya hingga tahun 2024, Pekon Sukanegeri Jaya baru mengembangkan dua dari enam indikator *smart village* yaitu indikator *smart governance* dan *smart economy*. *Smart governance* adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yaitu kemampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif.

Urgensi *smart governance* jika dilihat dari kebijakan yang mengatur tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang disadari menjadi sebuah kebutuhan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diatur secara khusus dalam pasal 86. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Terdapat aspek akses informasi

dan komunikasi dalam kuesioner Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini menyebutkan tentang ada atau tidaknya fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan oleh kantor kepala desa dan masyarakat desa serta penyebaran informasi tentang desa dan anggaran desa melalui *website* desa. Di pekon Sukanegeri Jaya ketersediaan internet pekon dapat diakses oleh seluruh masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya. Adanya fasilitas internet ini sangat mendukung dalam penyediaan sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan melalui program *smart village* yaitu *website* desa. *Website* ini berperan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya sebagai sumber informasi resmi, untuk meningkatkan pelayanan, media promosi potensi desa, dan sebagai sarana transparansi/keterbukaan publik. Selain *website* desa, Pekon Sukanegeri Jaya juga memiliki akun media sosial yang dipergunakan untuk promosi dan berita serta sistem e-commerce dalam rangka mengoptimalkan potensi desa.

Terdapat banyak penelitian mengenai pengembangan *smart governance* dalam konsep *smart village*. Maharani (2021) menemukan bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *smart governance* adalah jejaring dan kolaborasi. Peneliti telah menguraikan sebelumnya bahwa sejak tahun 2015 Pekon Sukanegeri Jaya telah berusaha mengembangkan *website* desa namun belum optimal. Dalam pelaksanaan *smart village* pemerintah provinsi Lampung bekerja sama dengan OpenDesa sebagai pihak ketiga yang mengembangkan dan membantu desa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbuka untuk memajukan desa. Melalui kerjasama ini OpenDesa menyediakan sistem informasi desa (SID) yang dimanfaatkan oleh Pekon Sukanegeri Jaya untuk mengembangkan *website* desa.

Berkaitan uraian tersebut tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan *Smart Governance* dalam Mewujudkan *Smart village* di pekon Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya kabupaten Tanggamus?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya kabupaten Tanggamus?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang berpengaruh terhadap penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya kabupaten Tanggamus.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan bagi penulis dengan memperoleh pengalaman langsung dalam penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkaitan dengan penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village* khususnya di pekon Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

### 1.4.2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi khususnya mengenai penerapan *smart governance* yang merupakan komponen utama dalam program *smart village*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat tema tentang penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village*. Penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan *smart governance* berdasarkan konsep *smart village*. Penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Indikator/Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Analisis Penerapan <i>Smart Governance</i> dalam Mewujudkan <i>Smart City</i> di Kota Semarang (Damayanthi & Nugroho, 2023).	Cohen ( <i>enabling supply &amp; demand side policy, transparency &amp; open data, dan ICT &amp; E-Gov</i> ).	Peran aktif masyarakat menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun penerapan <i>smart governance</i> tercermin pada aspek-aspek penting seperti kebijakan yang mendukung, transparansi, dan penggunaan teknologi untuk pelayanan publik.
2.	<i>Smart Government</i> dalam Rangka Mewujudkan <i>Smart City</i> di Kota Bandung (Santoso & Rahmadanita, 2022).	Cohen ( <i>city services, infrastruktur, dan open government</i> ).	<i>Smart governance</i> dalam rangka mewujudkan <i>smart city</i> di kota Bandung dilihat dari aspek <i>city services, infrastructure, dan open government</i> sudah baik. Dari ketiga aspek tersebut, aspek <i>infrastructure</i> menjadi satu aspek yang kurang mendukung dengan ditunjukkan terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data center serta belum adanya pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan pemerintah kota Bandung dalam menerapkan <i>smart governance</i> .
3.	Desa Cerdas: Transformasi	Indikator <i>smart governance</i> :	Implementasi <i>smart governance</i> dilakukan dalam tiga tahap yaitu

No.	Judul	Indikator/Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0 (Santoso, 2019).	partisipasi, transparansi dan pelayanan publik.	pengadaan infrastruktur penunjang baik fisik maupun non fisik, pengembangan dan pemanfaatan software dan SID, dan memaksimalkan saluran partisipasi publik secara <i>city</i> dan <i>city</i> .
4.	Penerapan <i>Smart Governance</i> dalam <i>Smart village</i> di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul (Maharani & Kencono, 2021).	Santoso: partisipasi, transparansi dan pelayanan publik	Penerapan <i>smart governance</i> di Kalurahan Dlingo sudah berjalan dengan baik. Pada pelayanan publik, sudah dilakukan pengadaan infrastruktur TIK yang kemudian menjadi produk unggulan dalam melakukan pelayanan publik yang prima. Pada aspek transparansi, pemerintah Kalurahan Dlingo mengandalkan Sistem Informasi Desa (SID) melalui fitur <i>website</i> desa. Pada aspek transparansi informasi, pemerintah Kalurahan Dlingo berupaya untuk terus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan <i>smart governance</i> yaitu faktor kepemimpinan, faktor jejaring dan kolaborasi, faktor modal sosial, dan faktor pendanaan.
5.	Desa Berbasis <i>Smart village</i> : Studi <i>Smart Governance</i> pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang (Huda, 2020)	Indikator <i>smart governance</i> : Pelayanan prima berbasis TIK, optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, dan transparansi informasi	Penyelenggaraan pelayanan masyarakat sudah berbasis TIK, optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta keterbukaan transparansi informasi publik yang memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID).

Sumber: Diolah Peneliti (2024).

Berdasarkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang telah dikembangkan tentang penerapan *smart governance*, diketahui bahwa *smart governance* dapat dimulai dengan melakukan pengadaan infrastruktur penunjang baik fisik maupun non fisik yang akan menunjang pengembangan dan pemanfaatan software dan SID guna memaksimalkan saluran partisipasi publik secara *city* dan *city*. Sistem informasi desa (SID) juga dimanfaatkan sebagai sarana optimalisasi partisipasi

dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dan pengelolaan dana desa yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta keterbukaan transparansi informasi publik. Berdasarkan tabel 4 tersebut juga ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart governance* yaitu faktor kepemimpinan, faktor jejaring dan kolaborasi, faktor modal sosial, dan faktor pendanaan. Peran aktif masyarakat menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur juga menjadi satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart governance*. Infrastruktur yang baik adalah infrastruktur yang berfungsi dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

## **2.2. E-Government**

Istilah *clean and good governance* muncul seiring dengan perubahan paradigma yang berkembang di Indonesia yang menuntut pelayanan yang lebih baik sehingga terdapat ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara (Wirawan, 2020). Makna *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan *Information and Communication Technologies (ICT)* yaitu *E-Government* atau Pemerintahan Elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *clean and good governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik.

*E-Government* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Bank Dunia (*World Bank*) mengemukakan bahwa *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses and arms of government*. Artinya *E-Government*

berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.

Di era digital, *E-Government* digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan di berbagai level. Terkait hal ini di dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan :

- a) Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b) Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan penyelenggara pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dan sebagai pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Dalam pelaksanaannya *E-Government* memiliki manfaat dan tantangan (Antoni, 2022). Manfaat yang dapat dirasakan dengan diterapkannya *E-Government* antara lain:

1. Meningkatkan rasa demokrasi publik yang tergambar pada keberanian mengeluarkan aspirasi pada media *city*;
2. Adanya bentuk kepedulian lingkungan, karena mampu mengurangi penggunaan kertas yang sangat banyak digunakan dalam lingkungan pemerintahan;
3. Kemudahan akses (waktu, tempat, kondisi) yang cepat sehingga menciptakan efisiensi dan kenyamanan; serta
4. Terciptanya penerimaan publik secara merata.

### **2.3. *Smart village***

*Smart village* atau yang dikenal dengan cerdas adalah program yang merupakan perwujudan dari butir ke-3 Nawacita yakni “membangun Indonesia dari pinggiran” yang implementasinya diperkuat dan didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut juga Undang-Undang Desa. *Smart village* adalah konsep baru pembangunan desa melalui solusi cerdas yang mendukung transformasi desa dalam jangka panjang menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan (Nieto & Brosei, 2019) dalam Andari & Ella (2021). Menurut Huda (2020) *smart village* adalah konsep desa pintar yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Definisi lain menurut Viswanadham dan Vedula (2010) yang dikutip dalam Maharani & Kencono (2021), *smart village* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kedalam sekumpulan layanan yang dikelola masyarakat desa dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dengan bertumpu pada 4 (empat) aspek, yaitu *institusi, sumber daya, rantai pelayanan, dan teknologi dan mekanisme penyampaian layanan*. Sedangkan menurut Zen Munawar dkk. (2023) *smart village* adalah masyarakat lokal pedesaan yang memanfaatkan teknologi dan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan kualitas,

standar layanan publik, dan memastikan sumber daya lokal dikelola dengan baik. Konsep *smart village* atau desa cerdas pada intinya menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai landasan dasar untuk mengelola dan membangun desa secara lebih efektif dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Baru dkk., 2019). Dalam Modul Desa Cerdas disebutkan bahwa tujuan pembangunan model desa cerdas adalah dalam rangka percepatan pembangunan desa untuk mewujudkan kondisi ideal desa dengan bertransformasi menjadi desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis, melalui pemanfaatan teknologi. Adapun prinsip desa cerdas yang menjadi dasar dalam pengembangan model desa cerdas yaitu transformasi digital, inklusif, kreatif, inovatif, kolaboratif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang *smart village* yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *smart village* adalah konsep pendekatan pembangunan yang mendorong desa untuk melakukan transformasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar serta pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

*Smart village* merupakan bentuk pengembangan dari *smart city*. Djunaedi (2018) dalam Shabrinawati (2020) pada implementasinya konsep *smart village* mengadopsi prinsip-prinsip yang sebelumnya sudah diterapkan dalam *smart city*, antara lain: budaya, etika dan norma, ramah lingkungan, *sustainable*/berkelanjutan, kemitraan, ekonomi, efektif dan efisien, bagipakai layanan, kepentingan publik, adaptif, dan *citizen centric*. Meskipun konsep *smart village* mengadopsi konsep *smart city*, namun dalam pelaksanaannya konsep *smart village* menyesuaikan dan mengintegrasikan dengan homogenitas atau keberagaman yang ada di desa sehingga konsep *smart village* ini dipahami berbeda-beda dan indikator yang digunakan setiap daerah juga berbeda (Herdiana, 2019). Lebih lanjut Herdiana mengemukakan adanya perbedaan konseptual antara *smart city* dan *smart village* seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 6. Perbedaan antara *smart city* dan *smart village*

No.	Aspek	<i>Smart City</i>	<i>Smart village</i>
1	Pendekatan	<i>Top-down</i>	<i>Bottom-up</i>
2	Posisi pemerintah	Regulator	Fasilitator
3	Posisi masyarakat	<i>End-user</i>	<i>Customer</i>
4	Proses pengembangan	Kolektivitas dan integrasi elemen dasar <i>smart city</i>	Penguatan, kesadaran dan partisipasi terhadap elemen <i>smart village</i>
5	Prioritas sasaran	Masyarakat dengan mobilitas tinggi	Masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan
6	Prasyarat keberhasilan	Pendekatan teknologi menjadi basis utama dimana setiap pihak didorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar keberhasilan <i>smart city</i> ,	Pendekatan sosio-kultural menjadi basis utama. Adanya identifikasi yang valid terhadap berbagai nilai, karakter, norma dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan <i>smart village</i> .
7	Tujuan	Terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses informasi dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.	Terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi.

Sumber: Herdiana (2019)

Pada dasarnya konsep *smart village* menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola dan membangun desa secara lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. *Smart village* sebagai bentuk pengembangan dari *smart city* mengadopsi konsep dan dimensi untuk mengukur keberhasilannya.

Menurut Giffinger dalam Rachmawati (2018) terdapat 6 (enam) dimensi *smart city*, yaitu *smart living*, *smart environment*, *smart mobility*, *smart governance*, *smart people*, *smart economy*. Lebih lanjut Rachmawati (2018) menjelaskan bahwa dalam pengembangan *smart village* terdapat beberapa dimensi *smart city* yang kurang sesuai jika dijadikan sebagai target pencapaian dalam pelaksanaan

*smart village*. Menurutnya beberapa dimensi yang sesuai adalah: *smart governance*, *smart community*, *smart economy*, dan *smart environment*. Sedangkan menurut Herdiana (2019) terdapat 3 (tiga) elemen pembentuk *smart village*, yaitu *smart governance*, *smart community*, dan *smart environment*.

Pendapat lain terkait dimensi *smart village* terdapat dalam Laporan Isu-Isu Strategis Pengembangan Desa Cerdas yang bertumpu pada 4 (empat dimensi) yaitu *smart society*, *smart government*, *smart economy*, dan *smart environment*. Sedangkan menurut Santoso dkk., (2019) dimensi desa cerdas diadopsi dari dimensi kota cerdas yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di desa yang meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, dan *smart living*. Dimensi-dimensi pembentuk *smart village* tersebut ditunjukkan seperti pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Dimensi *smart village*

No.	Komponen	Sumber			
		Santoso, dkk (2019)	Rachmawati (2018)	Herdiana (2019)	Laporan Isu-Isu Strategis Pengembangan Desa Cerdas (2018)
1.	<i>Smart community</i>	✓	✓	✓	✓
2.	<i>Smart economy</i>	✓	✓	–	✓
3.	<i>Smart governance</i>	✓	✓	✓	✓
4.	<i>Smart environment</i>	✓	✓	✓	✓
5.	<i>Smart living</i>	✓	–	–	–
6.	<i>Smart mobility</i>	✓	–	–	–

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Sutarjo dalam modul Konsep Desa Cerdas menjelaskan ke-enam pilar/dimensi *smart village* sebagai berikut.

1. *Smart community*, adalah investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan. Masyarakat yang mampu mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk mendayagunakan dan memperkuat

lembaga sosial desa, semangat keswadayaan, dan pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

2. *Smart economy*, yaitu tata kelola ekonomi desa yang ditopang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan kesetaraan akses atas sumber daya ekonomi desa, berorientasi pada kebermanfaatan yang dinikmati bersama dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. *Smart governance*, adalah tata kelola pemerintahan dimana teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik, tata kelola pemerintahan yang menekankan pada kapasitas aparatur desa, kapasitas kelembagaan desa, dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar yang memadai.
4. *Smart environment*, yaitu tata kelola lingkungan alam desa yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan daya tanggap terhadap pencegahan dan penanggulangan risiko bencana.
5. *Smart living*, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya sehingga terciptalah kualitas hidup dalam hal ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, keselamatan, perumahan, dan lain-lain.
6. *Smart mobility*, adalah meningkatnya keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, kemudahan akses bagi warga mendapatkan pelayanan seperti ketersediaan infrastruktur TIK maupun sistem transportasi yang inovatif dan aman.

#### **2.4. *Smart Governance***

Subkhan dalam Maharani & Kencono (2021) menyebutkan bahwa *smart governance* adalah dimensi yang penting dalam *smart village* karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan secara ‘cerdas’ sehingga dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan pola-pola tradisional dalam birokrasi dapat diubah menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Penerapan *smart governance* dalam *smart village* diharapkan desa mampu mengatasi permasalahannya sendiri seperti ketimpangan pembangunan antar kota dan desa, kemiskinan,

hingga permasalahan pada pemerintahan seperti pelayanan publik dan masalah transparansi yang buruk melalui perbaikan pada sistem yang lebih inovatif, efektif, efisien, dan komunikatif (Maharani & Kencono, 2021).

Menurut Santoso dkk. (2019) *smart governance* merupakan dimensi penting dalam *smart village* yang menyangkut tentang pelayanan elektronik dan media sosial yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam *smart governance* menurut Santoso dkk. (2019) yaitu:

1. Partisipasi, merujuk pada partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di level desa.
2. Transparansi, merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik
3. Pelayanan publik, menyangkut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huda, dkk (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam *smart governance* yaitu:

1. Pelayanan prima berbasis TIK
2. Optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
3. Transparansi.

Maharani & Kencono (2021) juga menyatakan hal serupa tentang aspek-aspek dalam *smart governance* yaitu:

1. Pelayanan publik, terdapat 3 (tiga) indikator pada aspek pelayanan publik yaitu penyediaan infrastruktur TIK, penyediaan layanan publik berbasis TIK, penyediaan layanan administrasi yang mudah dan cepat, penyediaan layanan aduan berbasis TIK.
2. Transparansi, keterbukaan informasi publik yang diupayakan dalam wujud transparansi berbasis TIK, dan transparansi informasi anggaran dan agenda pemerintah desa/kalurahan.

3. Kebijakan, merujuk pada optimalisasi partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan desa.

*Smart Government* melingkupi bidang kontribusi politik serta layanan publik dari sisi administrasi, seperti kontribusi dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum dan sosial, pemerintahan yang transparan, layanan *city*, sarana dan prasarananya. Cohen (2014) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek dalam *smart governance* yaitu:

1. *Enabling supply & demand side policy* (kebijakan yang mendukung)
2. *ICT & E-Gov* (Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK)
  - a. Infrastruktur
  - b. Layanan publik berbasis TIK
3. *Transparency & open data* (transparansi dan keterbukaan data dan informasi)
  - a. Transparansi informasi anggaran dan agenda pemerintah desa.
  - b. Transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan desa.

Karakteristik dan indikator dari *smart governance* yang diperoleh dari literatur tersebut bertujuan untuk menentukan indikator dari *smart governance* menurut penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Indikator *Smart Governance*

No.	Penulis	Indikator
1.	Santoso (2019)	Transparansi, partisipasi, pelayanan publik.
2.	Huda (2020)	Pelayanan prima berbasis TIK, optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, dan transparansi.
3.	Maharani (2021)	Pelayanan publik, transparansi, dan kebijakan.
4.	Cohen (2014)	<i>Enabling supply &amp; demand side policy, ICT &amp; E-Gov, Transparency &amp; open data.</i>

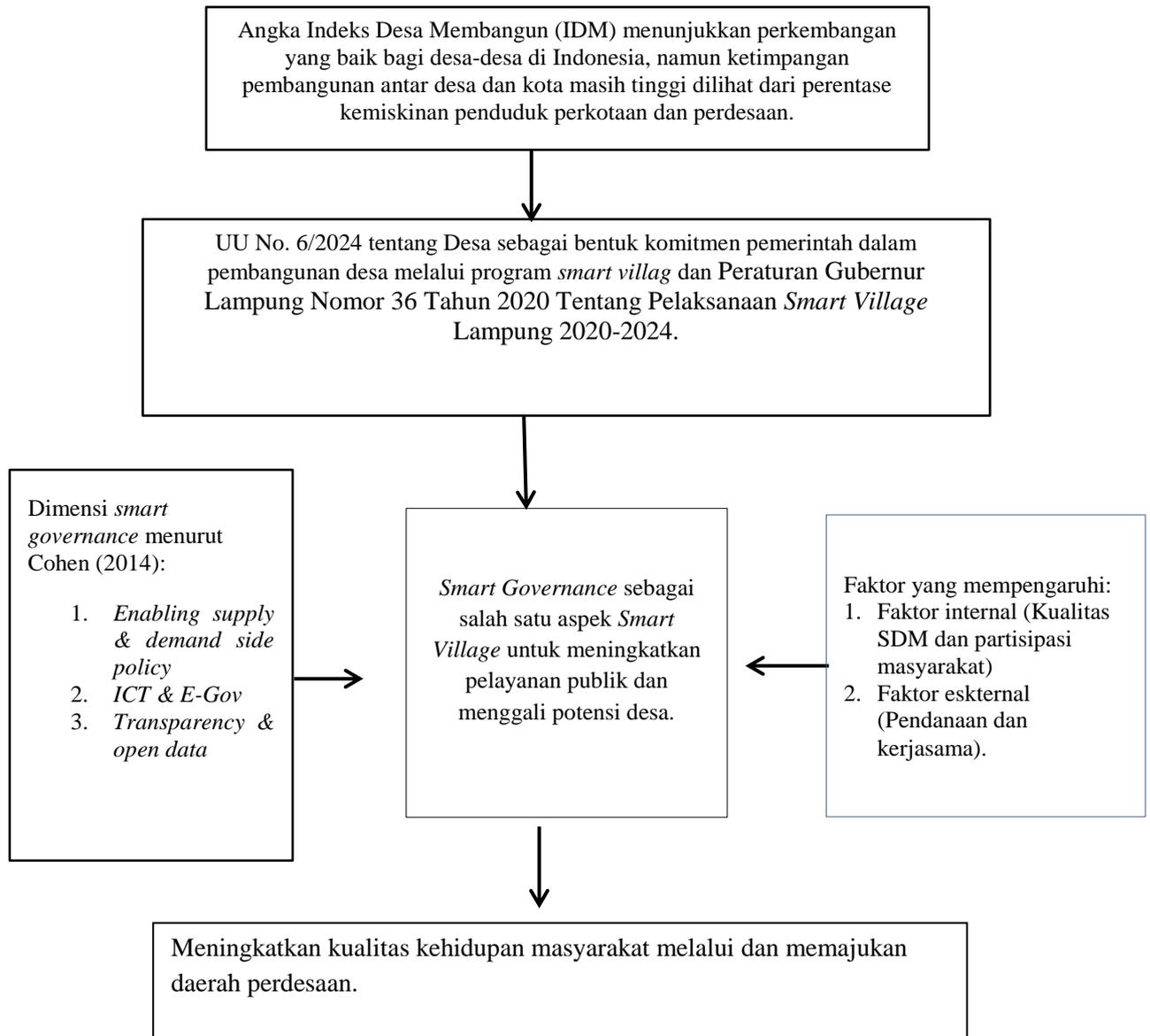
*Sumber: Hasil analisis, 2024.*

## 2.5. Kerangka Pikir

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan, oleh karena itu hendaknya pembangunan desa menjadi perhatian pemerintah. Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) pembangunan desa di Indonesia sudah masif dilakukan, angka tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan peningkatan status desa menjadi lebih baik. Namun sekalipun pembangunan desa mengalami peningkatan namun pembangunan di perdesaan dan diperkotaan masih mengalami kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak terdapat di perdesaan menurut data Badan Pusat Statistik.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya solutif untuk menekan ketimpangan pembangunan di desa. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan desa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi momentum dalam menciptakan kesejahteraan di desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi ruang bagi desa untuk berkembang dan berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, salah satunya adalah melalui pengembangan desa cerdas atau *smart village*. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Pekon Sukanegeri Jaya merespon amanat pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. *Smart village* provinsi Lampung memiliki tiga indikator yaitu *smart governance*, *smart economy*, dan *smart people*. Pekon Sukanegeri Jaya telah berhasil menerapkan indikator *smart governance* dan bersiap untuk mengembangkan dua indikator lainnya.

Penelitian mengenai *smart governance* dalam *smart village* ini menggunakan indikator *smart governance* menurut Cohen yaitu: *Enabling supply & demand side policy* (kebijakan yang mendukung), *ICT & E-Gov* (Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK), dan *Transparency & open data* (transparansi dan keterbukaan data dan informasi). Setelah melakukan analisis dengan mengacu pada ketiga indikator tersebut, peneliti juga akan mencari faktor yang mempengaruhi penerapan *smart governance* dalam *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.



“Dalam sebuah musyawarah pasti menyangkut lingkungan sektoral seluruhnya, baik itu di pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembangunan fisik ya jelas banyak ya, apalagi masyarakat desa ini kan menginginkan pembangunan yang bisa secara langsung dinikmati itu misalnya pembangunan jalan, drainase, TPP, normalisasi sungai, bronjong, dll.”

Masyarakat diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengusulkan atau mengajukan berbagai kebutuhan dalam banyak bidang, seperti pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, perbaikan pos kamling, pembuatan drainase, dan lain-lain. Saran dan usulan masyarakat tersebut seluruhnya ditampung untuk kemudian akan dibahas pada musyawarah desa atau musrenbang pekon untuk pertimbangan dan ditentukan skala prioritas pembangunannya. Beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pekon Sukanegeri Jaya dan ditampilkan di berita desa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 17. Pembangunan fisik Pekon Sukanegeri Jaya**

No.	Pembangunan	Tahun	Lokasi
1.	Pondasi balai pekon	2020	RT 005 / RW 001 - Dusun 01
2.	Balai pelatihan masyarakat	2021	Dusun 01
3.	Kolam ikan milik pekon	2022	RT 001 / RW 001 - Dusun 01
4.	Talud penahan tanah	2023	RT 005 / RW 001 - Dusun 0

*Sumber: Website Pekon Sukanegeri Jaya (diolah peneliti, 2024).*

Berdasarkan data pembangunan yang telah dilakukan oleh Pekon Sukanegeri Jaya tersebut, pembangunan fisik tersebut merupakan agenda pembangunan desa yang telah dilaksanakan setelah melalui tahap perencanaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat. Menurut keterangan dari sekretaris Pekon Sukanegeri Jaya, adapun pembangunan balai pelatihan masyarakat adalah inisiatif dari pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya yang kemudian mendapat antusias yang cukup baik dari masyarakat. Tujuan dari pembangunan balai pelatihan masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat serta sebagai sarana dalam menjalankan program pembangunan desa, yang artinya balai pelatihan masyarakat ini juga akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih maksimal.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa aspek-aspek penting yang menjadi fokus analisis, yaitu, *transparency & open data*, dan *ICT & E-Gov*, telah terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* di pekon Sukanegeri Jaya sudah berjalan dengan baik dalam konteks digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada indikator *enabling supply & demand side policy* sudah terdapat kebijakan yang jelas yang mengatur dan mendukung pelaksanaan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya. Kebijakan utama yang mengatur tentang *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya adalah RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Adapun kebijakan yang mendukung antarlain Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan *smart village* dan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pelaksana program *smart village*.

Pada Indikator *ICT & E-Gov*, infrastruktur berbasis TIK juga sudah cukup lengkap dan dapat dioperasikan dengan baik. Adapun pelayanan publik sudah berbasis TIK melalui Layanan Mandiri yang dapat diakses melalui *website sukanegerijaya.id* yang mana masyarakat dapat memmbuat permohonan berbagai jenis surat tanpa harus datang ke kantor. Pelayanan secara langsung di kantor pun sudah efektif dan efisien dengan memanfaatkan alat *scan* E-KTP sehingga masyarakat tidak perlu membawa dokumen tertentu untuk mendapatkan pelayanan. Data penduduk yang telah terintegrasi dalam satu sistem aplikasi *smart village* juga telah memudahkan proses pelayanan publik.

Pada indikator *transparency & open data*, Pekon Sukanegeri Jaya memanfaatkan *website* dan sosial media Facebook, Instagram, dan grup Whatsapp untuk menyebarkan berbagai informasi tentang pekon.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart village* di pekon Sukanegeri Jaya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendanaan dan kualitas SDM, adapun faktor eksternal meliputi faktor kerjasama dan partisipasi masyarakat. Pada faktor pendanaan, Pekon Sukanegeri Jaya mengalokasikan anggaran dana pekon (APBDes) dan Dana Bantuan Provinsi untuk menunjang keberlanjutan *smart governance*. Faktor SDM berkaitan dengan kemampuan aparat dan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan *smart governance*. Aparat Pekon Sukanegeri Jaya sudah cukup mampu dalam mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi dalam menunjang tugas-tugasnya namun pengetahuan tentang program *smart village* masih rendah. Kerjasama dilakukan oleh pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya dengan pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan maupun dinas-dinas. Adapun kerjasama bersama komunitas dilakukan dengan CRI OpenDesa dalam menyediakan sistem aplikasi *smart village*, dan kerjasama dengan akademisi melalui program pengabdian masyarakat dan KKN mahasiswa dari berbagai universitas. Partisipasi masyarakat dalam penerapan *smart governance* di pekon Sukanegeri Jaya masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal keterlibatan memanfaatkan layanan berbasis TIK. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang acuh dan apatis terhadap kebijakan pemerintah pekon terkait layanan mandiri dan pemanfaatan teknologi.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Perangkat Pekon Sukanegeri Jaya sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun pengetahuan tentang *smart village* masih kurang. Perangkat Pekon Sukanegeri Jaya yang memahami *smart village* dengan baik hanya Sekretaris Pekon dan Operator Pekon. Oleh karena itu diperlukan pelatihan lebih lanjut tentang program *smart village* terhadap

perangkat pekon yang meliputi kaur, kasi, dan staf serta perangkat pekon lainnya agar penerapan program desa cerdas ini lebih optimal.

2. Peran pemuda dalam menyebarkan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan *smart governance*. Muli Mekhanai Sukanegeri Jaya dapat mengambil peran tersebut dalam rangka meminimalisir masyarakat yang belum mahir dan masih acuh dalam mengakses layanan dan informasi pekon dalam mendukung *smart governance*.
3. Keterbatasan penelitian ini adalah wawancara informan narasumber penelitian yang hanya dilakukan di kantor Pekon Sukanegeri Jaya. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melengkapi keterbatasan tersebut dimana peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan lain yang terkait dengan program *smart village* yaitu Dinas PMDT dan Tim *Smart Village* Provinsi Lampung dan kantor kecamatan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
4. Saat penelitian ini selesai dilakukan, desa-desa pelaksana program *smart village* Provinsi Lampung sedang bermigrasi ke Metadesa yaitu website Sistem Informasi Desa Terpadu yang dikembangkan oleh Dinas PMDT dan Tim *Smart Village* Provinsi Lampung yang diberi nama NeuroFundamental. Hal ini dapat menjadi kajian pengembangan penelitian selanjutnya tentang *smart village* maupun *smart governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiqurrahman, A. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Studi Pada *Smart Government* di Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Sumenep) (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja Madura).
- Andari, R. N., & Ella, S. (2021). *Model Desa Cerdas Untuk Membangun Indonesia Maju* (1 ed.). Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Ananda, Ria. (2021). Analisis Penerapan Cash Management System (CMS) Dalam Mengembangkan Kinerja Profesionalisme Perangkat Desa di Kabupaten Sanggau. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 197-206.
- Arsyad, A. A. H. J., Sulisty, L., Rahayu, W., & Fatmawati, E. (2023). Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer Di Desa Terpencil. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 654-661.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan *Smart Kampung* di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>
- Damayanthi, C. D., & Nugroho, A. A. (2023). Analisis Penerapan *Smart Governance* Dalam Mewujudkan *Smart City* Di Kota Semarang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 77-83.
- Egita, S., Pratiwi, T. H. N., & Adelia, V. (2023). Penerapan Sistem Transaksi Cash Management Sistem (Cms)(Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Kcp Kampung Pon Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 4(2), 1-7.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2).
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep *Smart village* Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the *Smart village* Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). 6.

- Kurniawan, Y. T. (2018). Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *CAKRAWALA*, 12(1), 97-105.
- Kusumasari, Bevaola. (2024). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian* (1 ed.). Sleman: Deepublish.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan *Smart Governance* Dalam *Smart Village* Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25–38. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14472>
- Muhajir, R., Nasrulhaq, N., & Tahir, N. (2022). Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 299-314.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32-42.
- Nurjaman, R., & Prasetyo, A. G. (2018). Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 35–52. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.332>
- Oktarina, A., Pertiwi, C., Paluseri, A. R. A., Fazri, M., Nababan, F. E., Roidatua, M. R., & Imron, D. K. (2023). *Smart Governance* in Indonesian Village Towards SDGs Achievement. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 107-122.
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiatoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 43-54.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan smart village untuk penguatan smart city dan smart regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-19.
- Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep *Smart Governance* dalam paradigma *Smart City* di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *International Journal of Demos*, 3(2), 86-97.
- Restiane, F., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Efektifitas Penerapan Aplikasi Lapor Sleman Dalam Mewujudkan Sleman *Smart Regency*. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 6(1), 1-11.
- Sahirah, Z., Rudiana, R., & Sagita, N. I. (2021). Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan *City Rakyat* (Lapor) Oleh Dinas

- Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 144-155.
- Samodra, Joko, Andreas Syah Pahlevi, and Yon Ade Lose Hermanto. "Pasar desa digital berbasis web sebagai media promosi bagi umkm." *Jurnal Karinov* 2, no. 3 (2019): 177.
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Center for Digital Society.
- Saputri, A. D. B., & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan Cash Management System Dalam Bidang Program Dan Keuangan Balitbang Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*. 1(3), 194-204.
- Saputra, M. A., & Isnain, A. R. (2021). Penerapan *Smart Village* Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menggunakan Metode Web Engineering. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(3).
- Setyawan, A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(02), 43-52.
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). Implementasi *Smart Governance* Berdasarkan Konsep *Smart Village*. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 21(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>
- Silaban, Y. (2023). Efektivitas Layanan Aspirasi Pengaduan *City* Rakyat (LAPOR) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. *Journal Of Science and Social Research*, 6(1), 233-240.
- Sonjaya, C. B., & Al Mudzaki, T. (2023). Pengembangan *Website* Desa Sebagai Media Informasi Masyarakat Desa Segarjaya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 5345-5358.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sulistyarini, W., & Fatonah, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Era Digital Learning. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 2(1), 42-72.
- Wahyuni, T. (2023). Analisis Pengembangan Program Pendidikan Jarak Jauh Program Pendidikan Vokasi UI. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(2), 1.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan *E-Government* dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

- Yanti, D. Y. (2024). Pelaksanaan *Smart Village* Nusantara Dalam Perspektif *Smart Governance* Di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 748-764.
- Zein, R. (2022). Analisis efektivitas aplikasi *cash management system* (cms) KCP Bank Sumut Syariah Multatuli (Studi Bank Sumut Syariah multatuli). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4005-4018.
- Zen Munawar, Novianti Indah Putri, Rita Komalasari, Iswanto, Hernawati, & Andina Dwijayanti. (2023). Program Desa Cerdas Untuk Mendukung Keberlangsungan Rencana Strategis Desa. *Darma Abdi Karya*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38204/darmaabdikarya.v2i1.1345>.
- Zulfikar, A. M., Mappamiring, M., & Nasrulhaq, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Aspirasi Publik Dan Pengaduan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidrap. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1194-1214.

### **Peraturan**

- Keputusan Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020 tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot project Smart village* Provinsi Lampung Tahun 2020.
- Keputusan Gubernur Nomor G/71/II.02/HK/2021 tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot project Smart village* Provinsi Lampung Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.
- Peraturan Gubernur Nomor Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Lampung 2020-2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.